

HINDU DAN MULTIKULTURALISME: Sejarah, Warisan Budaya, Teks Suci dan Refleksi Kritis

I Nyoman Yoga Segara
Institut Hindu Dharma Negeri Denpasar
yogasegara@ihdn.ac.id

Abstract

This article is the result of an analysis of three major themes that show essentially the spirit of multiculturalism in Hinduism. The emanation of multiculturalism can be read again in the history of the entry of Hinduism into Indonesia, which is described by historians without expansive tendency. This real picture is legitimized in various cultural heritages, both in the form of spirituality and in material form, although the compilation of various inheritance is never quite complete. The multiculturalism dimension also resonates very strongly in the sound of the texts of the Vedic scriptures and other Vedic literatures, including literary works of the Mahakawi. But as an understanding, multiculturalism is also never firm, even on the contrary vulnerable to debate and criticism. This gap is quite wide open when multiculturalism is confronted with practical problems in social reality because one foot is firmly planted because multiculturalism becomes a cultural policy (political dimension). Ideological criticism of multiculturalism is also trying to be associated with changes in Balinese attitudes and responses to multicultural issues and cultural plurality.

Keywords: Hindu History; Cultural Heritage; Holy Text; Critical Reflection.

Abstrak

Artikel ini adalah hasil analisis terhadap tiga tema besar yang memperlihatkan secara esensial ruh multikulturalisme dalam Hindu. Emanasi multikulturalisme dapat dibaca ulang dalam perjalanan sejarah masuknya Hindu ke Indonesia yang digambarkan para sejarawan tanpa tendensi ekspansif. Gambaran nyata itu terlegitimasi dalam beragam warisan kebudayaan, baik dalam wujud kerohanian maupun dalam bentuk kebendaan, meskipun kompilasi berbagai warisan ini tidak pernah cukup lengkap. Dimensi multikulturalisme juga beresonansi sangat kuat dalam bunyi teks kitab suci Weda dan susastera Weda lainnya, termasuk karya sastra para mahakawi. Namun sebagai sebuah paham, multikulturalisme juga tidak pernah kokoh, bahkan sebaliknya rentan terhadap perdebatan dan kritik. Celah ini cukup menganga saat multikulturalisme dihadapkan pada persoalan-persoalan praktis dalam realitas sosial karena satu kakinya tertancap kuat karena multikulturalisme menjadi sebuah kebijakan kebudayaan (dimensi politik). Kritik ideologis terhadap multikulturalisme juga coba dikaitkan dengan perubahan atas sikap dan respon orang Bali terhadap isu-isu multikultural dan pluralitas kebudayaan.

Kata Kunci: Sejarah Hindu; Warisan Budaya; Teks Suci; Refleksi Kritis.

Pendahuluan

Mendiskusikan kembali multikulturalisme saat, misalnya terminologi mayoritas dan minoritas berposisi menjadi sedikit absurd. Hal ini terjadi karena sejak semula terdapat celah menganga yang menunjukkan konsep besar ini rentan dari kritik sekaligus tak pernah benar-benar kokoh (lihat Setyaningrum, 2003). Bahkan multikulturalisme potensial melahirkan konflik sosial saat ekspresi budaya dihadang posisi tak setara dalam identitas kolektif, padahal konsep ini mensyaratkan ketercairan ragam budaya secara dialektis dan berlangsung mutual. Geertz, 1993 (dalam Hayat, 2012: 9-10) sudah lama memperingatkan agar kita (bangsa Indonesia) berhati-hati mengelola pluralitas budaya. Untuk konteks

inilah dibutuhkan multikulturalisme yang sejalan dengan adab ke-Indonesia-an. Model multikulturalisme seperti apa yang dapat diterapkan, masih belum jelas meskipun berbagai model yang ada semuanya ideal. Azra, 2003 dari Parekh, 1997 (dalam Suputra, 2006) menyatakan setidaknya ada lima model multikulturalisme, yaitu multikulturalisme isolasionis, akomodatif, otonomis, kritikal/interaktif, dan kosmopolitan, dan Jock Youn (dalam Piliang, 2003) menyebut dua kecenderungan multikulturalisme yang masing-masing memiliki cara pandang yang berbeda dalam menanggapi perubahan dan transformasi, yaitu multikulturalisme plural dan multikulturalisme transformatif.

Masalahnya tidak pada soal bagaimana model multikulturalisme itu dipilih karena membiarkan semua bentuk dan jenis multikulturalisme itu tumbuh alamiah juga menjadi pilihan yang tidak salah. Hal ini mengingat dalam sejarahnya, multikulturalisme juga mengalami debat panjang. Diskusi teoritik diawali oleh J. Hector, seorang imigran Normandia dalam teori *melting pot*. Hector menekankan penyatuan budaya dan melelehkan budaya asal, sehingga seluruh imigran Amerika yang menjadi fokus studinya akan memiliki satu budaya baru, yaitu budaya Amerika, walaupun diakui bahwa monokultur mereka lebih diwarnai oleh kultur White Anglo Saxon Protestant (WASP) sebagai kultur imigran kulit putih yang berasal Eropa. Namun, ketika komposisi etnik Amerika semakin beragam dan budaya mereka semakin majemuk, teori *melting pot* mendapat kritik keras dan memunculkan *salad bowl*, teori alternatif yang dipopulerkan Horace Kallen. Berbeda dengan *melting pot*, Kallen justru menganjurkan untuk membangun budaya baru dengan keanekaan budaya tanpa menghilangkan budaya aslinya, layaknya gado-gado. Yang menarik adalah dua arus besar dalam teori multikulturalisme ini berkontribusi membangun budaya Amerika misalnya, menjadikan budaya nasional yang memberikan ruang besar adanya interaksi kultural antarberbagai etnik menuju teori *cultural pluralism*. Teori ini membagi ruang pergerakan budaya menjadi dua, yakni ruang publik untuk seluruh etnik yang mengartikulasikan budaya politik dan mengekspresikan partisipasi sosial politik mereka secara homogen dalam sebuah tatanan budaya Amerika. Namun, mereka juga dapat mengekspersikan budaya etnisitasnya secara leluasa di dalam ruang privat (lihat lebih lengkap Azzuhri, 2012:15-16).

Dengan demikian, sejarah multikulturalisme sebenarnya adalah sejarah tentang masyarakat majemuk. Negara seperti Amerika, Kanada, dan Australia adalah sedikit dari banyak negara yang sangat serius mengembangkan multikulturalisme, baik sebagai konsep maupun sebagai model dalam pendidikan. Pilihan ini diambil karena masyarakatnya kebanyakan para imigran dan selalu membuka ruang masuknya imigran lain dan tercerap di dalamnya. Namun yang menarik justru identitas kebudayaan asli negara-negara itu tidak hilang dan bahkan semakin kuat. Contoh terbaik dari Amerika adalah anak-anak diajarkan untuk fasih mengenal tiap bagian negara dan kebudayaannya dengan literasi yang utuh tentang apa itu Amerika Serikat. Sejarah dan kebudayaan Amerika telah menjadi buku manual, semacam peta kecil atau buku saku. Karya Hirsch (1987) tentang hal ini dapat menjadi inspirasi bagi kita (bangsa Indonesia) untuk meleleh budaya yang dimulai secara individu. Tak dapat dipungkiri, dengan meleleh budaya orang dapat dengan sadar meleleh tentang bangsanya. Kecintaan terhadap budaya lokal dan daerah akan bermuara pada kecintaan pada bangsanya. Meleleh budaya bisa dimulai dengan literasi cerita-cerita rakyat yang tersebar di hampir seluruh pelosok nusantara.

Namun demikian, multikulturalisme di Indonesia tampaknya juga berkaitan erat dengan pembentukan masyarakat berlandaskan Bhineka Tunggal Ika untuk mewujudkan kebudayaan nasional yang menjadi pemersatu bangsa. Namun secara praktik, konsep ini masih memiliki berbagai hambatan yang menghalangi terbentuknya multikulturalisme di masyarakat. Artinya, multikulturalisme di Indonesia harus menyediakan wadah untuk penampakan “yang lain”. Kehadiran “yang lain” itu harus dipahami tanpa reduksi dan

distorsi. “Yang lain” itu harus tampil dalam soliditas dan keutuhannya masing-masing. Identitas adalah fakta yang eksotis dan dengan demikian mustahil digeneralisasi apalagi disimplifikasi. Perbedaan diterima sebagai sarana relasi, bukan ancaman desktruktif atau dijadikan alasan untuk menjalankan represi (Fitri, 2005 dalam Azzuhri, 2012:17). Multikulturalisme di Indonesia berbeda dengan negara lain, termasuk Amerika, sekaligus menjadi menarik bukan saja karena keberadaan pluralitas budaya (multikultural) tetapi juga karena beragamnya agama, suku, ras, bahasa, etnis, pulau, dan berbagai kepercayaan yang masih hidup.

Lalu, mencerpakan multikulturalisme ke dalam ajaran agama Hindu menjadi sangat tautologis karena sejak kehadirannya di Indonesia, Hindu bahkan tidak memiliki masalah dengan pluralisme ini. Sebaliknya, Hindu memiliki sejarah yang memuliakan lokalitas nusantara, mewariskan nilai, dan meresonansikan secara universal teks-teks suci dalam Weda dan susastera Weda lainnya. Artikel ini akan menjelaskan kembali apa yang sesungguhnya sudah ada di dalam Hindu, namun juga memproyeksikan multikulturalisme secara reflektif, melalui *pertama*, perlu dijelaskan kembali napak tilas masuk dan berkembangnya Hindu di Indonesia yang ternyata tidaklah mudah. Para sejarawan pun juga tidak banyak memberikan keterangan, kecuali beberapa di antaranya dalam bentuk buku pengantar. Namun jejak-jejak peninggalan masa lalu, terutama wujudnya yang masih dapat diamati hingga saat ini menjadi referensi utama, yang meskipun tetap terbatas. Lanskap dan ensiklopedi tentang hal ini menjadi satu kebutuhan tersendiri. Dengan alasan ini, makalah ini juga tidak memungkinkan untuk menggambarkan kembali lika-liku perjalanan Hindu yang begitu panjang.

Kedua, berdasarkan berbagai catatan dan literatur, paling tidak warisan kebudayaan Hindu masih dapat dibaca ulang. Peninggalan itu dapat berupa benda, artefak dan sejenisnya, juga berwujud nilai, tradisi serta kebudayaan yang masih dianut sampai saat ini. Agama dan budaya lokal di masa lalu yang mendapat pengaruh Hindu juga masih menjalankannya sampai saat ini, meskipun secara formal tidak terang mewakili agama Hindu. Sejarah, kebudayaan dan nilai Hindu yang dahulu begitu dominan lalu mengakar kuat dalam peri kehidupan bangsa Indonesia, menjadi salah satu cara bagi Hindu untuk menggambarkan bahwa Hindu memiliki peran yang sangat besar, terutama bagi peradaban bangsa. Tanda paling sederhana dan mudah untuk menemukannya adalah masih bertahannya penggunaan beberapa idiom berbahasa Sanskerta dan simbol-simbol Hindu lainnya. Kebertahanan ini hanya dapat terjadi jika anasir itu tidak bermaksud menghilangkan atau menginvansi agama dan budaya lokal yang sebelumnya sudah ada. Agama Hindu sejak awal abad masehi hingga bertahan di Pulau Bali berhasil melakukan peran-peran pemuliaan itu.

Ketiga, selain sejarah dan warisannya itu, universalitas ajaran Hindu, terutama spiritualitas dan nilai kemanusiaan yang berangkat secara esoterik telah pula memberikan kontribusi besar bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Dengan ini, umat Hindu di manapun berada memiliki kesanggupan untuk hidup berdampingan dan terutama berkontribusi terhadap lingkungan sekitarnya. Secara kontekstual, beberapa idiomatik yang dikenal saat ini, seperti Tri Hita Karana atau Wasudewa Kutum Bhakam dan perenialisme lainnya adalah cara Hindu merespon tuntutan etika global. Kemampuan ini sudah lama menjadi cara Hindu untuk tumbuh dan hidup, sejak ribuan tahun sebelum masehi, dari India hingga sekarang di Bali.

Pembahasan

Selintas Masuknya Hindu ke Indonesia

Berdasarkan data sejarah yang dihimpun sejarawan Indonesia, salah satunya Soekmono (1973:35) menyatakan Hindu sebagai agama yang diyakini paling awal memasuki

Indonesia, bahkan kedatangannya sejak abad ketiga atau tahun 400 Masehi. Bukti paling valid menurut Soekmono adalah ketika ditemukan tujuh prasasti berbentuk *yupa* peninggalan kerajaan Kutei di Kalimantan Timur. Isi *yupa* yang ditemukan itu begitu menakjubkan karena memperlihatkan bagaimana perjalanan Hindu di Indonesia hingga mampu mendirikan kerajaan pertama di Indonesia, dan selanjutnya berkembang pesat di Pulau Jawa (lihat lebih lanjut dalam *ibid.*, hlm. 36-61).

Puncak keemasan perkembangan Hindu di Indonesia adalah ketika kerajaan Majapahit di Jawa Timur hampir menguasai seluruh Indonesia yang berdiri antara tahun 1293-1309 (*ibid.*, hlm 68). Masuknya agama Buddha ke Indonesia makin memperkokoh anasir asing, khususnya India di Indonesia. Agama Buddha sendiri berkembang dan hidup sangat harmoni dengan Hindu ketika wangsa Sanjaya dan Sailendra berkuasa di Jawa Tengah pada pertengahan abad ke Sembilan (*ibid.*, hlm 42-46). Terminologi Siwa-Buddha lahir dari hubungan dekat kedua agama ini pada masa itu. Artefak paling mengagumkan yang pernah ada di Indonesia, yaitu Prambanan (Hindu) dan Borobudur (Buddha) juga berdiri saat keduanya tumbuh dan berkembang di Indonesia.

Setelah Majapahit mengalami masa akhir sekitar tahun 1429 hingga 1522, banyak kerajaan-kerajaan kecil yang berada di bawah kekuasaannya kehilangan arah. Perang saudara dan konflik panjang membawa Majapahit pada kehancuran. Pada masa kritis itu, beberapa kerajaan Islam menghimpun diri untuk menaklukkan Majapahit. Rakyat Majapahit yang sebagian besar penganut Hindu lalu menyingkir ke wilayah aman, salah satu daerah yang paling terkenal pegunungan Tengger. Sebagian besar yang lainnya menuju Bali, berkembang dan bertahan kuat seperti yang dikenal saat ini (*ibid.*, hlm. 79). Penduduk di beberapa wilayah Indonesia yang pernah mendapat pengaruh Hindu masih menjalankan tradisi itu, meskipun mungkin secara formal mereka tidak beragama Hindu lagi. Yang menarik adalah perkembangan Hindu di Indonesia tidak dalam rangka melakukan ekspansi agama. Penghayat agama-agama lokal, kebudayaan asli serta tradisi leluhur nusantara yang telah ada tetap dipelihara, dirawat dan dipermulia dengan ajaran Hindu. Masuknya Hindu tidak untuk meng-agama-kan penganut agama lokal karena selain tidak menjadi karakteristiknya, agama-agama lokal itu eksistensinya telah mengakar jauh sebelum Hindu ke Indonesia (lihat juga Suhanah, 2004).

Warisan Hindu untuk Peradaban Indonesia: dari kerohanian hingga kebendaan

Warisan Hindu di Indonesia dapat ditelusuri dari berbagai peninggalan sejarah terutama ketika kerajaan Hindu berkuasa, bahkan ketika Indonesia masih mengalami masa purba, saat huruf dan angka belum dikenal. Warisan sejarah itu bisa tampak dari berbagai wujud, meskipun pada sistem nilai dan sistem gagasan, Hindu juga memiliki pengaruh yang sangat besar. Membaca kembali pikiran Koentjaraningrat (2005) tentang kebudayaan, maka seluruh hasil karya manusia adalah salah satu wujud kebudayaan itu. Soekmono (*op.cit.*, hlm 9) juga membedakan kebudayaan dalam dua wujud, yaitu *segi kebendaan* dan *segi kerohanian*.

Merujuk pendapat dua ahli tersebut, maka warisan Hindu di Indonesia sangatlah besar. Secara kerohanian, masa-masa perkembangan Hindu banyak dilalui dengan sistem kepercayaan terhadap Tuhan melalui personifikasinya sebagai *Brahma*, *Wisnu* dan *Siwa*. Pemujaan terhadap ketiganya diteruskan sampai saat ini melalui terminologi *Tri Murti*. Namun secara khusus, *Siwa* mendapat perhatian yang sangat besar, sehingga pada saat itu *Siwaisme* menjadi paham yang dominan, selain *Waisnawa* yang menempatkan *Wisnu* sebagai orientasi pemujaan. Paham lain yang juga berkembang saat itu adalah *Cakta* dan *Tantra* (*ibid.*, hlm. 28-34).

Khusus untuk wujud kebudayaan dari kebendaannya sangatlah banyak. Merangkum seluruh benda bersejarah itu cukuplah berat karena selain tidak terkompilasi

dengan baik, ada kemungkinan mengalami kehancuran dan kerusakan baik karena dimakan waktu, perubahan tempat maupun kelalaian manusia, serta persebarannya yang sangat luas. Soekmono (*ibid.*, hlm 35-79) memberikan keterangan bahwa penelusuran benda bersejarah dapat dimulai dari kerajaan Kutei di Kalimantan Timur. Pada masa ini, ditemukan tujuh buah prasasti berbentuk *yupa*, yaitu tugu peringatan upacara kurban. Prasasti ini menggunakan huruf Pallawa, berbahasa Sanskerta dan tersusun dalam syair. Upacara keagamaan yang dilakukan oleh para raja di Kutai mendapat pengaruh kuat dari Hindu. Nama-nama rajanya, seperti Aswawarman dan Mulawarman jelas berasal dari bahasa Sanskerta. Berikutnya, di Jawa Barat sekitar tahun 400-500 masehi berdiri kerajaan Tarumanegara, dengan rajanya yang terkenal Purnawarman. Pada masa ini ditemukan tujuh prasasti yang berhuruf Pallawa, berbahasa Sanskerta dan dalam bentuk syair. Dalam salah satu prasastinya, yaitu Ciaruton, terdapat lukisan dua tapak kaki yang melambangkan tapak kaki sang raja menyerupai kaki *Wisnu*. Sedangkan pada prasasti Kebon Kopi terdapat gambar tapak kaki gajah tunggangan sang raja yang dianggap sebagai kaki Airawata, gajah Dewa Indra.

Pada masa kerajaan Kaling atau Holing di Jawa Tengah yang berdasarkan berita Tionghoa dipimpin oleh pemerintahan raja T'ang (618-906), di Tuk Mas, sebuah daerah di kaki gunung Merbabu ditemukan prasasti berangka tahun 650 masehi yang ditulis dengan huruf Pallawa dalam bahasa Sanskerta dan isinya tentang sebuah sungai yang disamakan dengan Gangga di India. Pada batu prasasti dilukiskan gambar-gambar *trisula*, *kendi*, *kapak*, *sangkha*, *cakra*, *bunga teratai*. Lambang ini sejalan dengan simbol dewa-dewa Hindu. Prasasti berangka tahun 732 masehi berbahasa Pallawa dan berbahasa Sanskerta yang dikatakan indah juga ditemukan di desa Canggal, Magelang pada masa kerajaan Mataram, Jawa Tengah. Prasasti ini menceritakan tentang pendirian *lingga*, lambang *Siwa* di daerah Kunjaakunja oleh raja Sanjaya. Pada masa ini juga ditemukan beberapa candi, salah satunya candi Gunung Wukir yang di depannya terdapat *yoni* sebagai landasan bertumpunya *lingga*.

Peninggalan penting selanjutnya adalah ketika di desa Dinoyo, Malang, Jawa Timur ditemukan prasasti yang berangka tahun 760 masehi, dengan huruf Kawi dan berbahasa Sanskerta. Dari prasasti ini diketahui bahwa Gajayana yang merupakan keturunan Dewasimha saat memerintah kerajaan Kanjuruhan, pernah mendirikan sebuah bangunan arca untuk memuja Agastya. Diceritakan, peresmian arca ini juga dipimpin oleh para pendeta ahli Weda. Candi Badut yang diwariskan kerajaan Kanjuruhan juga menggambarkan *agama Siwa* berkembang pesat dan penemuan *lingga* di dalam candi menjadi bukti kuat pemujaan kepada Agastya yang digambarkan seperti *Siwa* dalam wujud *mahaguru*.

Pada saat wangsa Sanjaya masih memiliki kekuasaan disebagian Jawa Tengah, ada bukti sejarah yang sangat menarik saat ditemukan prasasti dalam Candi Kalasan yang ditulis dengan huruf Pra-Nagari dalam bahasa Sanskerta berangka tahun 778 masehi. Prasasti ini menggambarkan hubungan erat antara wangsa Sanjaya yang beragama Hindu dengan wangsa Sailendra yang beragama Buddha, terutama aliran Mahayana yang condong kepada Tantrayana. Beberapa candi pada masa ini menggambarkan corak kedua agama, dan mendapatkan kejayaannya ketika kedua wangsa bersatu. Saat bersatunya kedua wangsa ini, lahir artefak-artefak mengagumkan, yaitu Candi Borobudur oleh Samaratungga (Buddha) dan Loro Jonggrang atau dikenal Candi Prambanan oleh Rakai Pikatan (Hindu).

Setelah masa keemasan wangsa Sanjaya, pengaruh Hindu dan Buddha terus berkembang melalui wangsa Isana di Jawa Timur dan Bali. Lika liku sejarah itu dimulai dari Sindok (929-974); Sri Dharmawangsa (991-1016); Warmadewa (914-1080) di Bali; Sriwijaya (abad 11) yang menjadi pusat Buddha; hingga Airlangga (1019-1042), hingga

akhirnya berdiri kerajaan Kadiri (1042-1222). Raja paling masyur pada masa ini adalah Jayabaya (1130-1160) yang namanya dikekalkan dalam kakawin Bharatayuddha yang digubah Mpu Sedah pada 1157, lalu diselesaikan Mpu Panuluh yang juga menghasilkan kitab Hariwangsa dan Gatotkacasraya. Memasuki tahun 1200an, agama Hindu dan Buddha terus berkembang, kehidupan keagamaan diceritakan harmonis, hingga kerajaan Singasari pada 1222-1292 berkuasa. Pada masa ini pula banyak didirikan candi-candi Hindu dan lahir pula kitab Hindu sangat terkenal, yaitu Pararaton dan Nagarakartagama yang ditulis Mpu Prapanca. Berakhirnya kekuasaan Kadiri, mengantarkan babak baru puncak kejayaan agama Hindu di Indonesia melalui kerajaan Majapahit, terutama ketika Raja Hayam Wuruk berkuasa yang didampingi Mahapatih Gajah Mada.

Resonansi Multikulturalisme dalam Bunyi Teks Suci Hindu

Beberapa konsep esensial Hindu dan legitimasi *sloka* dan *mantra* berikut ini telah merepresentasikan nilai multikulturalisme, antara lain *pertama*, Tri Hita Karana, salah satu konsep yang menjelaskan bahwa umat manusia akan mendapatkan kebahagiaannya jika mampu hidup harmoni dengan alam dan lingkungannya, dengan sesama manusia dan dengan Tuhan. Secara aktual, konsep ini dituangkan dengan istilah *palemahan*, *pawongan* dan *parhyangan*. Ketiganya lalu diinternalisasikan ke dalam hidup bermasyarakat, mulai dari rumah tinggal hingga ke desa pakraman. Menjaga hubungan harmoni dan seimbang dilakukan kepada Tuhan atau *parhyangan*; kepada sesama manusia atau *pawongan*; dan kepada alam semesta atau *palemahan* (lihat lebih lengkap konsep ini dalam Wiana, 2006; 2007).

Praktik Tri Hita Karana tidak semata vertikal hanya kepada Tuhan tetapi juga horizontal kepada sesama manusia baik interumat Hindu maupun antarumat manusia lainnya, serta dengan alam lingkungan. Dalam beberapa kitab suci, umat Hindu diajarkan untuk selalu menghormati dan mencintai lingkungan wilayah tanah airnya. Atharwaweda. V.VI.21.1 menyatakan “Tanah Air adalah negeri tercinta yang utama di bumi ini”. Atharwaweda. V.XII.1.12: “Bumi ini adalah Ibu dan kami adalah putra dari Ibu Pertiwi”, dan Atharwaweda V.XII.10.12: “Bumi yang luas ini adalah Ibu dan kerabat kami, langit adalah ayah, pelindung, asal dan pusat kelahiran kami”, serta Yajurweda IX.22: “Kami menghormati Ibu Pertiwi”.

Kontribusi kepada tanah air, dapat juga dimulai dari pandangan bahwa Hindu yang menyatakan sesungguhnya manusia tidak pernah merasa terpisah dengan seluruh isi alam semesta. Misalnya, saat kehadiran manusia pada jaman Kertayuga, manusia membawa secara utuh sifat-sifat dewatanya atau kesadaran *atma*. Semua kebutuhan manusia dilayani oleh energi kosmis dalam bentuk *prana* yang meresap dalam partikel elektron atom asta *prakrti*. Uraian ini dinyatakan dalam Bhagawadgita VII.5 yang menyatakan “Semua elemen atau unsur asta prakrti patuh dengan dharmanya, dengan cara berosilasi (bergetar) dan merambat ke segala penjuru dunia, untuk segera memenuhi kebutuhan seluruh makhluk tiada kecuali.” Dengan kesadaran kosmis ini, umat Hindu tidak akan mau merusak alam semesta, karena jika itu dilakukannya berarti manusia telah merusak badan Tuhan dan badannya sendiri. Jika alam semesta rusak, manusia tidak akan bisa dapat hidup nyaman di atas bumi dan melangsungkan hidupnya. Manusia tidak akan mampu mempersembahkan yadnya kepada Tuhan karena alam sudah tidak mampu menyediakan bahan yang dibutuhkan manusia. Jika manusia merusak dan menyakiti alam semesta, manusia telah mengkhianati Tuhan yang telah melahirkan dirinya sendiri bersama makhluk hidup lainnya.

Kedua, Bhinneka Tunggal Ika sebagai bentuk penghormatan terhadap kemajemukan Indonesia. Umat Hindu menghormati kebenaran dari manapun datangnya dan menganggap bahwa semua agama juga bertujuan sama, yaitu menuju Tuhan. Sikap

etik ini diuraikan dalam kitab suci Bhagawadgita IX.29 yang menyatakannya “Aku tidak pernah iri dan selalu bersikap adil terhadap semua makhluk. Bagi-Ku tidak ada yang paling Ku-benci dan tidak ada yang paling Aku kasihi. Tetapi yang berbakti kepada-Ku, dia berada pada-Ku dan Aku bersamanya pula”. Begitu juga Bhagawadgita, IV.11 menyatakan bahwa “Jalan mana pun yang ditempuh seseorang kepada-Ku, Aku memberinya anugerah setimpal. Semua orang mencari-Ku dengan berbagai jalan, wahai putera Partha (Arjuna)”. Selanjutnya Bhagawadgita, VII.21 menyatakan “Kepercayaan apapun yang ingin dipeluk seseorang, Aku perlakukan mereka sama dan Ku-berikan berkah yang setimpal supaya ia lebih mantap”.

Pandangan Hindu tentang kebhinekaan sepenuhnya tertuang dalam Kakawin Sutasoma. Kitab yang digubah oleh Mpu Tantular dalam bentuk kakawin (syair) pada masa puncak kejayaan Majapahit di bawah pemerintahan Hayam Wuruk (1350–1389), pada lembaran-lembaran lontar ini terdapat ungkapan yang dipetik oleh para pendiri bangsa, yaitu pada pupuh ke-139 (bait V) yang dijadikan motto dalam Garuda Pancasila lambang Negara RI. Bait yang memuat kalimat tersebut selengkapnya berbunyi:

*Hyāng Buddha tanpāhi Çiva rajādeva. Rwāneka dhātu vinuvus vara Buddha Visvā.
Bhinneki rakva ring apan kenā parvvanosēn. Mangka ng Jinatvā kalavan
Çivatatva tunggal. Bhinnēka tunggal ika tan hana dharma mangrwa.*

Terjemahan bebasnya:

“Hyang Buddha tiada berbeda dengan Syiwa Mahadewa. Keduanya itu merupakan sesuatu yang satu. Tiada mungkin memisahkan satu dengan lainnya. Karena hyang agama Buddha dan hyang agama Syiwa sesungguhnya tunggal. Keduanya memang hanya satu, tiada dharma (hukum) yang mendua”.

Kalimat Bhinneka Tunggal Ika telah menginspirasi banyak orang bahwa sesungguhnya umat manusia di Indonesia dapat dipersatukan. Dalam banyak kitab suci, pandangan Hindu tentang kebhinekaan ini dapat dibaca dalam Atharwaweda VII.52.1 yang menyatakan “Semoga kami memiliki kerukunan yang sama dengan orang-orang yang dikenal dengan akrab, Semoga kami memiliki kerukunan yang sama dengan orang-orang asing, semoga Engkau memberkahi kami dengan keserasian (kerukunan/keharmonisan)”. Atharwaweda XII.I.45, menyatakan: “Semua orang berbicara dengan bahasa yang berbeda-beda, dan memeluk agama (kepercayaan) yang berbeda-beda, Sehingga bumi perthiwi bagaikan sebuah keluarga yang memikul beban. Semoga Ia melimpahkan kemakmuran kepada kita dan menumbuhkan penghormatan diantara kita, seperti seekor sapi betina kepada anak-anaknya”.

Bahkan dalam sembahyang Tri Sandhya yang dilakukan umat Hindu setiap tiga kali dalam sehari, ada pengharapan yang ditujukan untuk semua makhluk hidup agar memperoleh keselamatan, seperti bait kelima Puja Tri Sandhya yaitu: *Om Ksamasva mam mahadewa, sarwaprani hitangkara, mam moca sarwa papebyah, palayaswa Sadasiwa*, yang artinya: “Om Hyang Widdhi ampunilah hamba, semoga semua makhluk hidup (*sarwaprani*) memperoleh keselamatan (*hitangkara*), bebaskan hamba dari segala dosa dan lindungilan hamba”. Hindu juga memandang bahwa orang hina dan binatang sekalipun adalah sama, sebagaimana dinyatakan oleh Bhagawadgita V.18: “Orang bijaksana melihat semuanya sama, baik Brahmana budiman dan rendah hati maupun seekor sapi, gajah dan anjing ataupun orang hina dan papa”. Sedangkan Niti Sataka, 100 juga menyatakan dengan: “Seseorang yang telah melakukan banyak karma yang baik, baginya hutan rimba bagaikan istana yang indah, semua manusia menjadi sahabat dan seluruh bumi dipenuhi dengan kekayaan”.

Ketiga, swadharma dan Catur Guru sebagai bentuk kewajiban umat Hindu untuk negara. Masalah hak dan kewajiban sebagai warga negara, dalam Hindu dikenal dengan

istilah *swadharmaning agama* dan *swadharmaning negara*, yaitu menjalankan hak dan kewajiban dengan baik sebagai penganut agama dan sebagai warga negara. Jika umat Hindu sudah menjalankan kewajibannya sebagai umat beragama dengan baik, maka mereka sesungguhnya juga sudah menjalankan salah satu kewajibannya sebagai warga negara. Ketika menjalankan *swadharma* sebagai warga negara dengan baik, mereka sesungguhnya memiliki kemauan kuat untuk mendorong bangsanya mewujudkan kesejahteraan dan keadilan sosial dalam masyarakatnya, yang dalam Hindu dijalankan dengan konsep *loksamgraha*, yaitu kesejahteraan untuk seluruh masyarakat tanpa kecuali.

Konsep *loksamgraha* mengandung pesan tentang nilai kesetiakawanan dan kerelaan untuk berkorban demi kepentingan orang lain yang kurang beruntung. Konsep ini kemudian diteguhkan ke dalam beberapa etika sosial yang mengatur kehidupan umat Hindu, salah satunya mantram *sarwe bhawantu sukhinah* yang menekankan bahwa keselamatan pribadi bukanlah satu-satunya tujuan, tetapi bahwa kesejahteraan masyarakat, terutama masyarakat pemeluk Hindu, adalah sama pentingnya bahkan jauh lebih penting. Konsep *loksamgraha* adalah konsep ideal dari umat Hindu, namun diwujudkan melalui suatu proses. Misalnya, dimulai dengan proses tumbuhnya kesadaran sosial dikalangan para pemeluk agama, bahwa masing-masing dari kita adalah bersaudara satu sama lain atau *Wasudeva Kuthum Bhakam*.

Dalam beberapa kitab suci juga dijelaskan apa saja kewajiban umat Hindu sebagai warga negara dalam kesejahteraan dirinya maupun bangsa dan negaranya. Yajurweda IX.23 menyatakan: “Semoga kami selamanya tetap waspada di tengah-tengah bangsa dan maju untuk melindunginya”. Berturut-turut kitab suci lainnya juga menyatakan hal yang sama. Atharwaweda XII.1.62: “Semoga kami mengorbankan hidup kami untuk kejayaan bangsa”. Rgweda I.80.1: “Selalulah memberikan penghormatan kepada kemerdekaan bangsa”. Hal yang sama dapat juga dibaca pada Rgweda V.66.6 dengan pernyataan: “Hendaknyalah kami bekerja keras untuk mencapai kemerdekaan. Ia seharusnya dikawal oleh rakyat”.

Kewajiban sebagai warga negara, bukan hanya untuk diri sendiri sebagai individual. Sebagaimana sudah dijelaskan, dalam Hindu juga tersurat keinginan untuk menjalankan kewajiban untuk dunia dan alam semesta raya. Keinginan itu dapat ditemukan dalam beberapa kitab suci, antara lain: Yajurweda XIII.18 yang menyatakan “Berikan selalu makanan kepada bumi. Jangan rugikan atau sakiti dia dan mencemari dia”. Yajurweda X.97.20: “Para dewa, Engkau adalah para pelindung seluruh dunia. Semoga Engkau menyediakan suatu bangsa ideal semacam itu kepada kami yang bisa memberi makanan seluruh dunia”. Yajurweda XVII.74: “Ya, Tuhan Yang Maha Esa, kami berdoa untuk intelek kedewataan itu yang bisa dipergunakan untuk kesejahteraan alam semesta”. Atharwaweda I.31.4: “Semoga terdapat kesejahteraan untuk orang tua kami, sapi-sapi betina itu, keseluruhan dunia dan umat manusia”. Yajurweda X.4: “Para dewa, Engkau merdeka dan jadi pelindung umat-manusia. Semoga Engkau memberkahi kami dengan suatu bangsa yang merdeka dan melindungi kemanusiaan”.

Menjalankan kewajiban sebagai warga yang baik juga diajarkan melalui *catur guru bhakti*, yang salah satunya *guru wisesa*. Pemerintah dan alat-alat negara adalah salah satu *guru* yang harus dihormati karena perannya sebagai pelindung negara, tempat setiap umat Hindu menjalankan kehidupannya. Menjalankan dan *bhakti* kepada *catur guru* dianggap sebagai salah satu cara umat Hindu paling sederhana untuk berkontribusi dalam berbagai macam bentuk tugas dan kewajiban sesuai kemampuan dan kompetensinya.

Multikulturalisme: sebuah refleksi kritis

Dilema Multikulturalisme: Kebijakan Politik vs Realitas Sosial

Berbagai konsep multikultural yang termanasikan dalam Hindu cukuplah terang, namun konsep ini juga tak rentan dari masalah, terutama dari aspek epistemologi dan praxisnya. Multikulturalisme sering dipandang hanya sebagai monumen mati, atau bangunan konsep yang tak bermakna jika diperhadapkan dengan masalah konkrit yang mengoyak nilai dan substansinya. Masalah ini bisa terjadi karena multikulturalisme mengandung dua dimensi yang tidak selalu diametral. Dua dimensi multikulturalisme itu oleh Setyaningrum (2003:244) disebabkan karena berangkat dari politik dan kebudayaan. Dalam pengertian politisnya, multikulturalisme adalah kebijakan negara untuk melindungi keberagaman latar belakang identitas kolektif, seperti etnis, suku bangsa, ras, bahkan agama di dalam suatu negara bangsa. Dalam dimensi kebudayaan, multikulturalisme adalah konstruksi sosial terhadap kesadaran untuk melihat keragaman identitas kolektif di dalam relasi sosial yang bersifat mutual dan untuk memahami unsur-unsur yang tidak setara dalam masing-masing identitas kolektif suatu kelompok yang sebetulnya potensial memicu konflik sosial.

Dengan dua dimensinya yang dilematis itu menjadikan multikulturalisme sebagai konsep yang tidak kokoh karena rentan untuk dibenturkan sebagai ide utopis dengan realitas sosial. Oleh karena itu, celah kosong dalam konsep besar ini menjadi peluang untuk melakukan refleksi dengan menerjemahkan kembali arti nasionalisme, yang oleh Anderson (1983) bahkan dianggap semu dan imajiner, serta perlunya menentukan batasan yang tegas dari identitas kolektif (Hall, 1992; lihat juga Barth, 1969; Camaroff & Camaroff, 2009; Haddock and Sutch, 2003; Ardhana, 2002). Hal ini penting dilakukan untuk mereduksi dampak multikulturalisme akibat posisinya sebagai alat kebijakan politik dengan realitas sosial yang mengharuskan tumbuhnya kesadaran menghormati keberagaman. Pekerjaan menjadi sulit untuk memikirkan keadaan yang selalu seimbang dan inklusif, selama misalnya, terminologi mayoritas dan minoritas menjadi diksi untuk menjelaskan ketidaksetaraan (lihat juga Kymlicka, 1995).

Dilema multikulturalisme dapat dipahami karena kebudayaan tidak pernah pasif dan vakum dalam lingkungannya yang setiap saat bisa berubah. White (1949) menyatakan perubahan kebudayaan dapat terjadi karena manusia mampu mengelola energi dan karena kemampuannya itu (White menyebutnya bangsa) dalam mengelola energi yang bervariasi. Oleh karena itulah kemajuan kebudayaan setiap bangsa akan berbeda-beda. Dalam konteks yang lebih luas, Appadurai (2006) menyatakan bahwa dalam masyarakat dunia abad 21 akan mengalami pembagian dualistik, yaitu urusan *private*, seperti identitas, etnisitas dlsb yang berkenaan dengan dirinya sendiri, maupun urusan *public*, jaringan dan pergeseran perubahan. Ini yang dalam kesempatan lain Appadurai (1997) sebut sebagai masyarakat transnasional.

Oleh karena itu, multikulturalisme akan terus berada dalam persimpangan, baik sebagai pandangan hidup maupun sebagai kebijakan kebudayaan. Qodir (tt) tegas mengatakan negara juga telah gagal mengelola multikulturalisme karena secara sempit mengartikulasikannya melalui simbol-simbol semu, salah satunya proyek TMII. Pendapat ini tidak dapat dihindari dan disalahkan. Dua cara pandang ini dapat dibaca dalam Mudzhar (2005:174, lihat juga Mudzhar, 2004) yang menyatakan bahwa multikulturalisme adalah istilah yang digunakan untuk menjelaskan pandangan seseorang tentang ragam kehidupan di dunia, ataupun kebijakan kebudayaan yang menekankan tentang penerimaan terhadap realitas keragaman, dan berbagai macam budaya (multikultural) yang ada dalam kehidupan masyarakat menyangkut nilai-nilai, sistem, budaya, kebiasaan, dan politik yang mereka anut. Terakomodasinya pandangan yang bias itu juga dikatakan Parekh (2001) dengan menyebut ada tiga komponen multikulturalisme, yakni kebudayaan, pluralitas kebudayaan, dan cara tertentu untuk merespons pluralitas itu,

sehingga multikulturalisme bukanlah doktrin politik pragmatik, melainkan juga cara pandang kehidupan manusia.

Multikulturalisme di Bali: tantangan dalam relasi Hindu dan Islam

Dalam berbagai survei, Bali masuk kategori yang masyarakatnya toleran. Survei Indeks Kerukunan Umat Beragama oleh Badan Litbang, Kementerian Agama menempatkan Bali sebagai propinsi yang selalu masuk lima besar sejak 2015. Maarif Institute (2016) bahkan menempatkan Denpasar sebagai kota paling Islami setelah Yogyakarta dan Bandung. Hasil survei ini ditanggapi secara beragam. Banyak yang setuju, tidak sedikit yang menolak karena hasil survei ini dianggap belum sesuai realitas. Wijaya (2004:133) sejak lama mempertanyakan idiom “masyarakat Bali itu toleran” karena menurutnya tesis ini tidak sepenuhnya dibangun dari praksis, bersifat empirik, melainkan melalui struktur pemikiran dominan bahwa “masyarakat Bali-Hindu beragama secara *to be* (menjadi) bukan *to have* (memiliki)”.

Pendapat Wijaya terkonfirmasi oleh Basyar (2016:2-3) yang menyatakan ketegangan relasi antara Hindu dan Islam di Bali sempat muncul terutama pasca ledakan dua bom Bali. Hasil penelitiannya menyimpulkan bahwa antara tahun 2009-2011, umat Hindu dan Islam mengalami sedikit “guncangan”, misalnya karena *sweeping* Kartu Tanda Penduduk (KTP), terutama muslim pendatang dan “orang-orang luar”. Umat Islam merasakan perlakuan yang berbeda dari masyarakat dan aparat keamanan. Situasi agak sedikit memanas ketika media-media internasional saat peliputan ledakan bom itu selalu menyebut Bali sebagai satu-satunya pulau Hindu, dan menggambarkannya sebagai legenda sumber kedamaian dan harmoni. Akibatnya umat Islam dianggap sebagai pengganggu kerharmonisan yang telah berlangsung lama itu. Meskipun secara umum relasi kedua agama tampak harmoni, tapi di bawah permukaan konflik-konflik yang bersifat tersembunyi juga masih sering terjadi.

Penelitian Basyar (2016: 6-8) juga menggambarkan riak itu karena dominasi Hindu melalui, misalnya “memaksakan” pemberlakuan Peraturan Daerah (Perda) yang bernuansa Hindu. Begitu juga keharusan untuk mematuhi aturan dan ketentuan hari libur di Bali yang berbeda dengan ketentuan nasional. Hal ini pula yang menyebabkan ada perusahaan yang hanya menerima karyawan non Hindu karena merasa perusahaan tidak akan produktif jika karyawannya terlalu sering ijin untuk merayakan hari raya lokal Bali (lihat juga <https://www.nusabali.com/berita/29024/lowongan-jangan-menyinggung-sara> diunduh tanggal 23/08/2018 dan <https://www.republika.co.id/berita/dunia-islam/islam-nusantara/14/08/24/nat1xz-ini-kronologis-pelarangan-pemakaian-jilbab-di-bali> diunduh 23/08/2018).

Menurut Basyar, penelitiannya pada 2009 di Jembrana dan Buleleng juga memperlihatkan kesulitan umat Islam untuk mendapatkan tempat ibadah di kantor pemerintah dan rumah sakit. Mereka harus pulang ke rumah dulu hanya untuk sholat, setelah itu kembali bekerja. Kajian serupa juga dilakukan pada 2010 yang memperlihatkan kasus serupa di Gianyar dan Tabanan. Pasang surut relasi Hindu dan Islam juga pada aspek ekonomi ketika pendatang Islam pada 1970an mulai semakin banyak dan merambah sektor jasa, salah satunya pariwisata yang menjadi sumber penghasilan pokok masyarakat Hindu Bali. Berdasarkan data ini, menarik untuk ditunggu implementasi Peraturan Gubernur Bali Nomor 80 Tahun 2018 tentang Pelindungan dan Penggunaan Bahasa, Aksara, dan Sastra Bali serta Penyelenggaraan Bulan Bahasa Bali, Peraturan Gubernur Bali Nomor 79 Tahun 2018 tentang Hari Penggunaan Busana Adat Bali dan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Desa Adat di Bali terhadap pemeliharaan kerukunan di Bali. Begitu juga sektor ekonomi dengan berdagang yang banyak “dikuasai” pendatang Muslim.

Sekali lagi, era pariwisata inilah yang dianggap melahirkan pola baru hubungan keduanya yang kadang mengalami pasang surut dan keras lunak (lihat lebih lengkap Mashad, 2014).

Namun dibandingkan ketegangan yang sempat terjadi, dinamika relasi kedua agama masih tergolong landai. Penelitian Basyar (2016: 4-6) menunjukkan karena pola adaptasi umat Islam yang sangat baik disebabkan saat kedatangannya pertama kali mereka dikatakan sudah belajar banyak hal di Bali terutama pertanian, perdagangan dan lain-lainnya. Setelah kemerdekaan, umat datang ke Bali dengan beragam profesi, seperti pegawai, tantara dan aparat pemerintah dan meskipun tidak alamiah, proses asimilasi dan akulturasi mulai terjadi dan harmoni kedua agama berlangsung sampai saat ini. Proses-proses tersebut telah banyak menghasilkan pola yang unik, misalnya penamaan orang yang mengkombinasikan nama Bali dan Islam, seperti yang terjadi pada masyarakat Pegayaman, Buleleng; Kepaon, Denpasar; Loloan, Jembrana. Bahkan umat Muslim di Candi Kuning II, Bedugul sedang mengajukan diri sebagai “Desa Adat Kampung Islam” karena secara *de facto* mereka juga sudah memiliki *awig-awig/perarem* tersendiri, meskipun secara *de jure* masih belum diakui pemerintah setempat. Hal yang sama dijelaskan Karim (2016) bahwa budaya menjadi pintu masuk yang merekatkan umat Hindu dan Islam di Loloan, Jembrana (lihat juga Segara, 2018a, 2018b, 2018c; Halimatusa’diah, 2018; Kartini, 2016; Muchtar, 2013; Parimatha, dkk., 2012).

Quo vadis Multikulturalisme di Bali?

Proposisi yang diajukan Wijaya di atas menjadi menarik jika dikaitkan dengan konstelasi politik. Misalnya, ketika H. Bambang Santoso lolos sebagai senator DPD RI mewakili Bali pada Pileg 2019, banyak orang Bali merasa kecolongan. Kekecewaan sebagai mayoritas Hindu yang seolah tidak rela “orang lain” mewakilinya terekspresikan di mana-mana, termasuk di media sosial. Namun pada saat bersamaan, ketika ada orang Bali sebagai minoritas di luar Bali berhasil lolos sebagai legislator, masyarakat Bali begitu bangga dan mengelu-mengelukannya sebagai “kemenangan politis” (lihat <https://www.nusabali.com/berita/52232/52-krama-bali-lolos-jadi-anggota-dewan-diunduh-29-September-2019>). Terdapat inkonsistensi sekaligus ambigu menanggapi masalah tersebut.

Kejadian yang sama dapat dibaca dalam realitas sosial saat, misalnya beberapa ormas Bali semakin berotot bukan saja terhadap “orang lain” tetapi juga sesama orang Bali sendiri (Segara, 2018). Dalam bidang kebudayaan, munculnya Ajeg Bali mungkin bagi sebagian kalangan dianggap sebagai puncak ambiguitas itu. Fenomena seperti Ajeg Bali di beberapa kebudayaan lumrah terjadi, seperti di Sumatera melalui “Hikayat Prang Sabi” karya Damste, dan “Perang di Jalan Allah: Aceh 1873-1912” oleh Teuku Ibrahim Alfian. Adapun di Sumbawa pada akhir abad 19 muncul perlawanan untuk mempertahankan identitasnya sebagai umat Islam (Ardhana, 2004:96). Ajeg Bali meski bermuatan positif, namun diskursus ini juga rentan terhadap perdebatan. Kerepun (2004) menanggapi dengan sangat serius, terutama wajah Ajeg Bali yang dianggapnya belum jelas, tolok ukurnya belum ada, hingga visinya di masa kini. Kerepun mencurigai Ajeg Bali bernuansa nostalgia dengan konsep *Baliseering* yang dibuat Belanda agar Bali tidak boleh berubah tetapi selalu genuine dan otentik. Melalui kontruksi ini Bali akan selalu eksotik untuk dinikmati wisatawan.

Melanjutkan kekhawatirannya, Kerepun (*ibid*, hlm 145-157) melalui analisisnya menyatakan beberapa kelemahan karakter orang Bali, salah satunya perubahan pada sikap toleran dan sifat jujur. Triguna (2004:168-175) menyebut ada beberapa perubahan yang menjangkiti orang Bali dengan beberapa penyebab. *Pertama*, perubahan fisik yang memperlihatkan ketimpangan antara laju pertumbuhan penduduk dengan ketersediaan lahan, termasuk lahan pertanian. *Kedua*, kecenderungan perubahan karakter, terutama

ketidaksiapan dan ketidakmampuan orang Bali untuk bersaing dengan pendatang serta institusi sosial dan kultural sudah tidak banyak yang mampu memerankan fungsi-fungsi manifes.

Dalam perspektif historis, perubahan di atas mencerminkan bahwa agama, etnisitas dan identitas menjadi isu sensitif yang seringkali dapat dimanipulasi untuk memicu reaksi emosional jika tidak dapat diantisipasi. Eriksen (1993) menyebutkan persoalan politik identitas muncul karena ada kekhawatiran eksistensinya terancam. Ambivalensi dan ambiguitas dalam merespon dua fakta sosial ini mengafirmasi kesulitan untuk melakukan idealisasi multikulturalisme, sebagaimana sulitnya melakukan internalisasi ajaran dalam kitab suci Weda dalam kehidupan. Gap *dasolen* dan *dasein* ini merefleksikan pertanyaan tentang apakah telah terjadi disorientasi orang Bali dalam menjalankan multikulturalisme.

Penutup

Diskusi tentang multikulturalisme belakangan mulai hangat kembali, terutama saat kondisi bangsa dalam keadaan “panas” karena beragam konflik bernuansa suku, agama, ras dan antargolongan. Multikulturalisme akhirnya mulai dipertanyakan. Keadaan ini membuktikan bahwa sebagai konsep besar (*grand theory*), multikulturalisme tidak pernah selesai dan ajeg sebagai satu-satunya solusi mengatasi masalah sosial, agama dan budaya. Bahkan sejarah kelahirannya juga mengalami perdebatan. Setelah teori *melting pot* meredup, digantikan *salad bowl* dan kini ada kecenderungan menggunakan pendekatan *cultural pluralism*. Dalam praktiknya, multikulturalisme juga dianggap mengalami dilemma karena konsep ini bermata dua, sebagai alat untuk mengambil kebijakan politik dibidang kebudayaan dan sebagai pandangan hidup yang memberikan kesadaran baru untuk melihat keberagaman dan keliyasan. Dalam perjalanannya menuju “proses menjadi”, multikulturalisme juga akan mengalami pasang surut sesuai konteks jaman dan momentum.

Multikulturalisme ala Amerika dan beberapa negara yang masyarakatnya majemuk karena kehadiran para imigran, serta kemampuan mereka yang berhasil mengelola keberagaman itu, agak berbeda dengan keadaan Indonesia yang tidak saja majemuk karena budaya tetapi karena entitas yang lainnya. Pada akhirnya, agama-agama di Indonesia juga dimintakan pandangannya sekaligus kontribusinya terhadap penguatan multikulturalisme. Agama Hindu dalam perjalanan sejarahnya sejak awal masehi telah pula mengajarkan jalan damai dengan penghormatan dan pemuliaan terhadap “agama lokal nusantara” yang telah lebih dahulu hidup sebelum kehadiran agama-agama dunia lainnya. Dominasi hingga hegemoni sejak keahdirannya di Indonesia tidak membuka lebar-lebar keinginan untuk melakukan homogenisasi. Namun sebaliknya, Hindu merawat kekayaan nusantara itu. Perjumpaan agama Hindu dan budaya yang begitu lembut telah begitu banyak menghasilkan kearifan lokal diberbagai daerah. Bhinneka Tunggal Ika yang tertuang dalam Kakawin Sutasoma menjadi puncak hasil kontemplasi tentang visi besar seorang Mahakawi Mpu Tantular, harapan yang lahir saat kerajaan Hindu mengalami masa kejayaan dan keemasannya. Begitu juga warisan kebudayaan baik berwujud kerohanian dan kebendaan tersebar luas, sedangkan bunyi teks kitab suci Weda dan susastera Weda juga telah beresonansi mengajarkan sikap inklusif dan terbuka pada yang liyan.

Daftar Pustaka

- Anderson, Benedict. 1983. *Imagined Communities*. London: Verso.
- Appadurai, Arjun. 1997. “Patriotism and Its Future” on Arjun Appadurai, *Modernity at Large: Cultural Dimention of Globalization*. Minneapolis: The Univ. of Minneapolis Press.
- Appadurai, Arjun. 2006. *Anthropology and Globalization*. New York: Prentice-Hall.

- Ardhana, I Ketut. 2002. "Masyarakat Multikultural: Konsep, Perbincangan Wacana, Analisis dan Temuan." *Masyarakat Indonesia*, XXVIII, No. 1.
- Ardhana, I Ketut. 2004. "Kesadaran Kolektif Lokal dan Identitas Nasional dalam Proses Globalisasi" dalam I Wayan Ardika dan Darma Putra (ed). *Politik Kebudayaan dan Identitas Etnik*. Denpasar: Fakultas Sastra Universitas Udayana Balimangsi Press.
- Azzuhri, Muhandis. "Konsep Multikulturalisme dan Pluralisme dalam Pendidikan Agama (Upaya Menguniversalkan Pendidikan Agama dalam Ranah Keindonesiaan)" *Forum Tarbiyah* Vol. 10, No. 1, Juni 2012: 13-29.
- Barth, Fredrik. 1969. *Ethnic Groups And Boundaries "The Social Organization of Culture Difference"*. Little Brown and Company Boston.
- Basyar, Hamdan M. 2016. "Muslim di Klungkung, Karangasem, dan Bangli: Suatu Catatan Pendahuluan" dalam *Masyarakat Muslim Bali di Klungkung, Karangasem dan Bangli*. Yogyakarta: Calpulis.
- Comaroff, John L & Jean Comaroff. 2009. *Ethnicity*. Inc. The University of Chicago Press.
- Ericksen, Thomas Hylland. 1993. *Ethnicity and Nationalism: Anthropological Perspective*. London and Boulder, Colorado: Pluto Press.
- Haddock, Bruce and Peter Sutch (eds.). 2003. *Multiculturalism, Identity, and Right*. Roudledge: London and New York Press.
- Hall, Stuart. 1992. "The Question of Culture Identity" on S. Hall and McGrew (eds), *Modernity and Its Futures*. Cambridge: Cambridge Polity Press and Open University.
- Halimatusa'diah. "Peranan Modal Kultural dan Struktural dalam Menciptakan Kerukunan Antarumat Beragama di Bali" *Jurnal Harmoni* Vol. 17 Nomor 1 Januari-April 2018. Hal 43-65.
- Hayat, Bahrul. *Mengelola Kemajemukan Umat Beragama*. Jakarta: Saadah Cipta Mandiri, 2012.
- Hirsch, J.H. 1987. *Cultural Literacy*. New York: Penguin.
- Karim, M. Abdul. "Toleransi Umat Beragama di Desa Loloan, Jembrana, Bali (ditinjau dari Perspektif Sejarah)." *Analisis*, Volume XVI, Nomor 1, Juni 2016. Hal: 1-32.
- Kartini, Indriana. 2016. "Dinamika Kehidupan Sosial Budaya Muslim Karangasem" dalam *Masyarakat Muslim Bali di Klungkung, Karangasem dan Bangli* (editor Hamdan M. Basyar). Yogyakarta: Calpulis.
- Kerepun, I Made Kembar. 2004. "41 Kelemahan Karakter Orang Bali Berdasarkan Analisis SWOT" dalam I Wayan Ardika dan Darma Putra (ed). *Politik Kebudayaan dan Identitas Etnik*. Denpasar: Fakultas Sastra Universitas Udayana Balimangsi Press.
- Koentjaraningrat. 2005. *Pengantar Antropologi I*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Kymlicka, Will. 1995. *Multicultural Citizenship, a Liberal Theory of Minority Right*. Oxford: Oxford University Press.
- Mashad, Dhurorudin. 2014. *Muslim Bali Mencari Kembali Harmoni yang Hilang*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.
- Muchtar, Ibnu Hasan. "Peran Kelompok Keagamaan dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama (Studi Kasus Desa Adat Angantiga, Petang, Badung, Bali)". *Jurnal Harmoni* Vol 12. Nomor 3 September-Desember 2013. Hal 136-152.
- Mudzhar, M. Atho. 2004. "Kebijakan Negara dan Pemberdayaan Lembaga dan Pemimpin Agama dalam Rangka Keharmonisan Hubungan Antar Umat Beragama" dalam *Damai di Dunia Damai untuk Semua: Perspektif Berbagai Agama*. Jakarta: Proyek Peningkatan Pengkajian Kerukunan Hidup Umat Beragama, Puslitbang Kehidupan Beragama, Badan Litbang Agama dan Diklat Keagamaan, Depag RI.

- Mudzhar, M. Atho. 2005. *Pengembangan Masyarakat Multikultural Indonesia dan Tantangan ke Depan (Tinjauan dari aspek Keagamaan dalam Meretas Wawasan & Praksis Kerukunan Umat Beragama di Indonesia)*. Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Keagamaan Puslitbang Kehidupan Beragama Depag RI.
- Parekh, Bikhu. 2001. *Rethinking Multiculturalism*. Harvard.
- Parimmartha, I Gede, Ida Bagus Gde Putra, Luh Pt. Kusuma Ririen. 2012. *Bulan Sabit di Pulau Dewata. Jejak Kampung Islam Kusamba-Bali*. Yogyakarta: CRCS.
- Piliang, Yasraf Amir. 2003. "Konsep Heteronomi sebagai Strategi Kultural Otonomi Daerah Perbandingan". *Jurnal Ilmu-Ilmu Budaya Poestaka*, No. 6 Tahun XIV Agustus 2003.
- Qodir, Zuly. *Kebhinekaan, Kewargaan, dan Multikulturalisme*. Tanpa tahun, tanpa penerbit.
- Segara, I Nyoman Yoga. "Pura Langgar: Representation of Hindu and Islamic Relation in Bunutin, Bangli". *Proceedings of International Seminar Bali Hinduism, Tradition, and Interreligious Studies*. Universitas Hindu Indonesia, 2018. Page 185-191.
- Segara, I Nyoman Yoga. "The Cultural Treasures of Kampung Bugis in the Customary Village of Serangan, Denpasar". *Journal Heritage Nusantara* Vol. 7 No 1, 2018. Page. 94-118
- Segara, I Nyoman Yoga. "Kampung Sindu: Jejak Islam dan Situs Kerukunan di Keramas, Gianyar, Bali." *Jurnal Lektur Keagamaan*, Vol. 16, No.2, 2018: 315-346.
- Segara, I Nyoman Yoga. 2018. *Calep (Catatan Lepas) Kebudayaan*. Denpasar: WartamPlus.
- Setyaningrum, Arie. 2003. "Multikulturalisme sebagai Identitas Kolektif, Kebijakan Politik dan Realitas Sosial." *Jurnal Ilmu Sosial dan Politik*. Vol 7, No. 2 Nopember 2003: 243-260.
- Suhanah (ed). 2014. *Dinamika Agama Lokal di Indonesia*. Jakarta: Puslitbang Kehidupan Keagamaan, Badan Diklat dan Litbang Kementerian Agama.
- Suputra, Pande Made. "Identitas Etnis dan Otonomi Daerah dalam Membangun Multikulturalisme di Indonesia" dalam I.B.G. Pujaastawa (ed). 2006. *Wacana Antropologi Kusumanjali untuk Drs. I Wayan Geriya*. Denpasar: Pustaka Larasan.
- Soekmono, R. 1973. *Pengantar Sejarah Kebudayaan Indonesia 1 dan 2*. Yogyakarta: Kanisius.
- White, Leslie. 1949. *Science of Culture: A Study of Man and Civilization*. New York: Grove Press.
- Wiana, I Ketut. 2006. *Menyayangi Alam Wujud Bhakti Pada Tuhan*, Surabaya: Paramita.
- Wiana, I Ketut. 2007. *Tri Hita Karana menurut Konsep Hindu*. Surabaya: Paramita.
- Wissler, Clark. 1943. *The Indians of North America*. Berkeley, Calif.: University of California Press.
- Wijaya, I Nyoman. 2004. "Menjadi atau Memiliki Hindu: Pluralisme Agama di Bali dalam Dimensi Sejarah" dalam *Bali Menuju Jagaditha: Aneka Perspektif*. I Nyoman Darma Putra (ed). Denpasar: Pustaka Bali Post.